

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab 1 sampai dengan bab 4, dapat disimpulkan beberapa point- point di bawah ini:

1. Penerapan Sistem Informasi Berbasis Teknologi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat telah menerapkan berbagai sistem informasi modern seperti Sisnaker, Absensi Online, e-Kinerja, Madani Sumbar, dan SIRUP guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya manusia serta pelayanan publik.

Manfaat Nyata Sistem Informasi :

- a. Meningkatkan efisiensi administrasi dan layanan publik.
  - b. Mempermudah monitoring dan evaluasi kinerja pegawai.
  - c. Mendorong pengembangan SDM melalui pelatihan digital dan akses informasi kerja.
  - d. Meningkatkan transparansi pengadaan barang/jasa dan realisasi anggaran.
2. Kendala yang Dihadapi
    - a. Rendahnya literasi digital pada sebagian pegawai, khususnya usia 40 tahun ke atas.
    - b. Pelatihan SDM yang belum merata, sehingga terjadi kesenjangan keterampilan dalam menggunakan sistem.
    - c. Ketiadaan panduan teknis yang jelas, menyebabkan ketergantungan pegawai pada rekan kerja atau tim IT.

3. Keterbatasan infrastruktur, seperti jaringan internet dan perangkat komputer yang belum merata.
4. Keterbatasan anggaran, menghambat pengadaan fasilitas serta pengembangan kompetensi secara berkelanjutan.
5. Dampak Positif Implementasi Sistem Informasi Berbasis Teknologi

- 
- a. Transparansi dan efisiensi layanan meningkat, khususnya dalam pengurusan AK-1, pelaporan, dan pengaduan.
  - b. Kinerja pegawai lebih terukur dan objektif melalui integrasi data absensi dan capaian target kerja.
  - c. Peningkatan kompetensi masyarakat dan ASN, serta dukungan terhadap pengembangan kewirausahaan berbasis digital.
  - d. Pengawasan yang lebih efektif, memungkinkan pimpinan mengambil keputusan berbasis data aktual.
6. Keselarasan dengan Regulasi Pemerintah Implementasi Sistem Informasi tersebut mendukung arahan dari Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2018 dan mendukung kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
  7. Rekomendasi untuk Optimalisasi
    - a. Perlu peningkatan literasi digital bagi seluruh pegawai melalui pelatihan berkala dan menyeluruh.
    - b. Penyusunan panduan teknis yang praktis dan user-friendly untuk setiap sistem informasi.
    - c. Penguatan infrastruktur dan alokasi anggaran agar penerapan sistem dapat berjalan optimal dan merata di seluruh unit kerja.

## 5.2 Saran

### 1. Bagi Penulis

- a. Penulis diharapkan terus mengembangkan wawasan dan keterampilan di bidang administrasi perkantoran berbasis teknologi informasi, terutama dalam menghadapi tantangan era digitalisasi birokrasi.
- b. Penulis perlu memperdalam kemampuan analisis terhadap sistem informasi pemerintahan agar dapat memberikan kontribusi lebih besar ketika terjun ke dunia kerja, khususnya di sektor publik atau pelayanan masyarakat.
- c. Pengalaman penelitian ini diharapkan menjadi landasan awal untuk menumbuhkan kepedulian dan ketertarikan dalam mendukung transformasi digital di lingkungan kerja mana pun nantinya.

### 2. Bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat

- a. Perlu dilakukan pelatihan literasi digital secara berkala dan menyeluruh kepada seluruh pegawai, termasuk generasi yang belum terbiasa dengan sistem digital, agar tidak terjadi kesenjangan kompetensi.
- b. Penyusunan panduan teknis penggunaan sistem informasi yang praktis, ringkas, dan mudah dipahami sangat disarankan untuk meminimalkan ketergantungan pegawai terhadap tim teknis.
- c. Disarankan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan infrastruktur, seperti koneksi internet dan perangkat kerja di seluruh unit agar penggunaan sistem berjalan optimal.
- d. Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran yang lebih memadai untuk pengembangan SDM dan modernisasi perangkat pendukung, sehingga digitalisasi bisa berjalan lebih merata dan berkelanjutan.

### 3. Bagi Universitas

- a. Universitas diharapkan lebih aktif dalam menyelaraskan kurikulum pendidikan vokasi dengan perkembangan teknologi informasi yang diterapkan di sektor pemerintahan.

- b. Perlu ditingkatkan kerja sama antara universitas dengan instansi pemerintahan, seperti Disnakertrans, dalam bentuk magang, riset terapan, dan pengabdian masyarakat, sehingga mahasiswa dapat terlibat langsung dalam proses digitalisasi administrasi publik.
- c. Universitas juga diharapkan menyediakan pelatihan atau workshop tambahan mengenai sistem informasi pemerintahan, sebagai bekal praktis bagi mahasiswa jurusan administrasi perkantoran yang akan memasuki dunia kerja.

